

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DOKUMEN PALSU TERHADAP SURAT KEPUTUSAN TENAGA HONOR LAPANGAN (THL)

Oleh:

M. FAISAL RIZKI

Pasal 263 KUHP berisi unsur memalsukan surat dan membuat surat palsu dan termasuk dalam tindak pidana formil tetapi bukan tindak pidana materil sehingga perbuatannya membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilarang dan diberi sanksi pidana sehingga berhasil tidaknya si pelaku bukan hal mutlak. Tindak Pidana pemalsuan menurut Pasal 263 KUHP adalah sebagai salah satu menyimpang dan bertentangan dengan hukum sehingga modus operandi baik. Tindak pidana pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Permasalahannya: a. Bagaimana peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL)? b. Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL)?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL) adalah menggunakan Pasal 263 kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai acuan dasar menghukum pelaku pemalsuan Surat Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL). Adapun Pasal 263 KUHP adalah berisi memalsukan surat dan membuat surat palsu. 2. Faktor penghambat dalam penanggulangan Surat Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL) palsu ini adalah personil kekurangan alat, tidak adanya bukti pembandingan dalam uji lab forensik laboratorium, dan tidak bisa membuktikan keaslian dari Surat Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL) yang diduga palsu.

Saran penulis adalah 1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat dalam penguasaan teknologi informasi, khususnya dibidang tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen. 2. Kepada masyarakat untuk lebih menambah pengetahuan mempelajari Kembali tentang penipuan pemalsuan surat atau dokumen termasuk Surat Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL) dan menelaah Kembali dari setiap informasi yang diterima.